

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri diwajibkan untuk Anak-anak wajib sekolah 9 tahun (SD-SMA). Sebelum Pemerintah membuat kebijakan baru mengenai biaya Sekolah gratis, banyak masyarakat Indonesia yang tidak mampu untuk memutuskan tidak memberikan pendidikan untuk anaknya melalui Sekolah karena biaya yang cukup mahal bagi mereka. Akan tetapi pemerintah memberikan solusi agar masyarakat yang tidak mampu tetap dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang Sekolah Menengah. Setelah adanya kebijakan baru dari pemerintah untuk biaya sekolah gratis yaitu BOS (Bantuan Operasional Gratis) Masyarakat pun sangat merasa senang dengan adanya kebijakan tersebut, karena dengan adanya BOS siswa/siswi SD, SMP, & SMA tidak lagi harus bayaran Sekolah / Uang SPP, karena pemerintah sudah menanggung untuk biaya tersebut.

Seiring dengan ketatnya tantangan global, tantangan dunia pendidikan pun menjadi semakin besar, hal ini yang mendorong para siswa/siswi mendapatkan prestasi terbaik. Namun dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan diantaranya adalah keterbatasan akses pada pendidikan, jumlah guru yang belum merata, serta kualitas guru tersebut yang dinilai masih kurang. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, keterbatasan akses pendidikan di daerah menjadi pangkal daerah arus Urbanisasi. “Yang menjadi persoalan, di jabodetabek jumlahnya sudah proporsional, tapi jangan kita hanya bicara urban. Justru di luar urban itu kita punya masalah dan itu yang menyebabkan migrasi ke Jakarta,” ujar Anies Baswedan. Secara tidak langsung masyarakat Indonesia didorong untuk melakukan Urbanisasi karena keterbatasannya fasilitas di daerah. Ia menilai akses pendidikan harus di buka seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat dengan penyediaan fasilitas yang mendukung program tersebut. Selain itu, jumlah guru yang sesuai dengan kualifikasi saat ini dinilai masih belum merata di daerah. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (DIKDAS), Hamid

Muhammad. Saat ini banyak Sekolah Dasar (SD) di Indonesia kekurangan tenaga Guru. Jumlahnya diperkirakan mencapai 112 ribu Guru. Untuk mengatasinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD) akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam hal distribusi guru di daerah-daerah agar lebih merata. “Jika manajemen guru bisa ditangani lebih optimal, tidak parsial maka bisa di pindahkan ke kabupaten atau daerah yang berdekatan,” ujar Hamid. Asesmen Media Informasi & Komunikasi Penilaian Pendidikan (Buletin: Vol.11/No.3 Desember 2015).

Gambar 1.1
Contoh Ujian Nasional Berbasis Kertas (LJK)

UN
(*Paper*
Test)



PBT
Based

Sumber: [http.kemendikbud.ac.id](http://kemendikbud.ac.id): 2017

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh mutu pendidikan, yaitu pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki standar kompetensi minimum pada setiap jenis, jalur dan jenjang. Pendidikan merupakan investasi manusia yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena manusia berfungsi sebagai salah satu faktor produksi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengukur kemampuan siswa/siswi sekolah pemerintah menerapkan kebijakan Ujian Sekolah atau Ujian Nasional. Untuk Sekolah dasar (SD) biasa disebut Ujian Sekolah, Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) biasa disebut dengan Ujian Nasional (UN).

Ujian Nasional (UN) adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan. Proses pemantauan evaluasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membenahi mutu pendidikan. Pembenahan mutu pendidikan dimulai dengan penentuan standar. Penentuan standar yang terus meningkat diharapkan akan mendorong peningkatan mutu pendidikan, yang dimaksud dengan penentuan standar pendidikan adalah penentuan nilai batas (*cut off score*). Seseorang dikatakan sudah lulus/kompeten apabila dia telah melewati nilai batas tersebut berupa nilai batas antara peserta didik yang sudah menguasai kompetensi tertentu dengan peserta didik yang belum menguasai kompetensi tertentu. Bila itu terjadi pada Ujian Nasional atau Sekolah maka nilai batas berfungsi untuk memisahkan antara peserta didik yang lulus dan tidak lulus disebut batas kelulusan, kegiatan penentuan batas kelulusan disebut *standard setting*. Asesmen media informasi & komunikasi penilaian Pendidikan (Buletin: Vol.11/No.3 Agustus 2015).

Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait penyelenggaraan Ujian Nasional yaitu, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dan untuk yang menyelenggarakan yaitu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD).

Perkembangan teknologi dan komunikasi semakin pesat. Hal ini dikarenakan dengan munculnya teknologi berbasis komputer. Dengan adanya teknologi berbasis komputer ini dapat mempermudah kita dalam mengolah data. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer sendiri awalnya digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri.

Tahun 2015 adalah tahun reformasi bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Implementasi reformasi dalam konteks *e-government* pada sektor pendidikan khususnya di bidang penilaian pendidikan adalah diterapkannya Ujian Nasional (UN) dengan menggunakan media komputer atau *Computer Based Test* (CBT). UN CBT merupakan program terobosan dalam merespon isu keraguan, akuntabilitas dan kredibilitas program asesmen pendidikan nasional, yang secara bertahap mulai UN tahun 2015 diterapkan di sejumlah provinsi. Pelaksanaan UN CBT sekaligus akan memperkecil tingkat kebocoran maupun contek-menyontek karena paket soal UN berbeda-beda antara satu peserta ujian yang lain, dan soal-soal UN CBT hanya dapat dibuka dengan password tertentu pada saat hari dan waktu pelaksanaan Ujian Nasional. Implementasi kebijakan ini memang membutuhkan dana investasi yang sangat besar pada tahap awal, baik untuk pengadaan perangkat komputer, peningkatan mutu SDM pelaksana di daerah, sampai dengan desiminasi dan sosialisasi pelaksanaan UN CBT kepada *policy makers, stakeholders* pendidikan dan masyarakat pengguna (Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa). Namun bila kondisi ini sudah mencukupi, pembiayaan penyelenggaraan UN (UN CBT) menjadi relatif murah dan ramah lingkungan. Untuk UNBK itu sendiri dikeluarkan oleh Peraturan Menteri (Permen) 'Dikbud No 144 Tahun 2014', lalu dikeluarkan kembali oleh Dikbud mengenai UNBK Peraturan Menteri (Permen) 'Dikbud No. 57 Tahun 2015'.

Gambar 1.2

Contoh Ujian Nasional Berbasis Komputer/UNCBT

UN CBT (*Computer Based Test*)



Sumber: [http.kemendikbud.ac.id](http://kemendikbud.ac.id): 2017

Berikut ini merupakan dasar-dasar hukum Ujian Nasional:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 144 Tahun 2014 tentang Kebijakan Ujian Nasional Berbasis Komputer.

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 57 Tahun 2015 tentang Kebijakan Ujian Nasional Berbasis Komputer.

Apa itu UNBK/UNCBT?

Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) disebut juga Computer Based Test (CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT) yang selama ini sudah berjalan.

Sosialisai UNBK/UNCBT

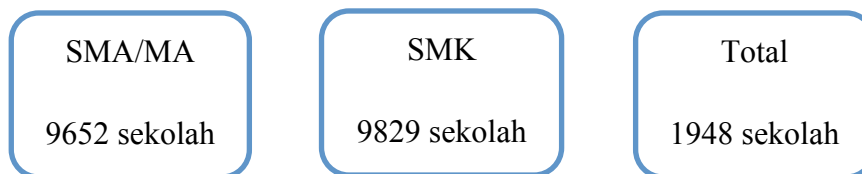
Jakarta, Kemendikbud – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (rakor) Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah tahun 2017 di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (22/12/2016). Rakor tersebut diikuti 563 peserta, terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota, para Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK), dan para Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) se-Indonesia. Pada kesempatan tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan beberapa pokok kebijakan terkait pelaksanaan UN dan ujian sekolah. "Ujian Nasional tetap dilaksanakan di tahun 2017. Kita juga tingkatkan mutu ujian sekolah dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk beberapa mata pelajaran. Kemendikbud juga akan memperluas pelaksanaan ujian berbasis komputer," disampaikan Mendikbud kepada para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Plaza Insan Berprestasi. Mendikbud juga menyampaikan nantinya soal-soal USBN akan dibuat oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai organisasi profesi. Adapun soal tersebut akan dibuat dengan perpaduan soal yang dibuat oleh guru dan soal jangkar dari pusat sebesar 20 sampai dengan 25 persen. "Penyebab utama usulan moratorium UN itu

adalah dampak negatif dari UN yang mereduksi hakikat pendidikan dan menyebabkan banyak pelaku pendidikan tergoda berbuat tidak jujur. Pekerjaan kita sekarang ini adalah bagaimana mengurangi dampak negatif dalam pelaksanaan UN. Kita harus menyelenggarakan UN dengan jujur dan berintegritas,” ungkap Menteri Muhadjir. Ketua BSNP, Erica Laconi menyampaikan bahwa penyelenggaraan UN tahun 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, sehingga UN tidak lagi digunakan untuk kelulusan dari satuan pendidikan. Ke depan, BSNP akan segera mengeluarkan Prosedur Operasi Standar (POS) Pelaksanaan UN tahun 2017.

Pelaksanaan UNBK/UNCBT

Penyelenggaraan UNBK saat ini menggunakan sistem semi-online yaitu soal dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan (sinkronisasi) ke server lokal (sekolah), kemudian ujian siswa dilayani oleh server lokal (sekolah) secara offline. Selanjutnya hasil ujian dikirim kembali dari server lokal (sekolah) ke server pusat secara online (upload).

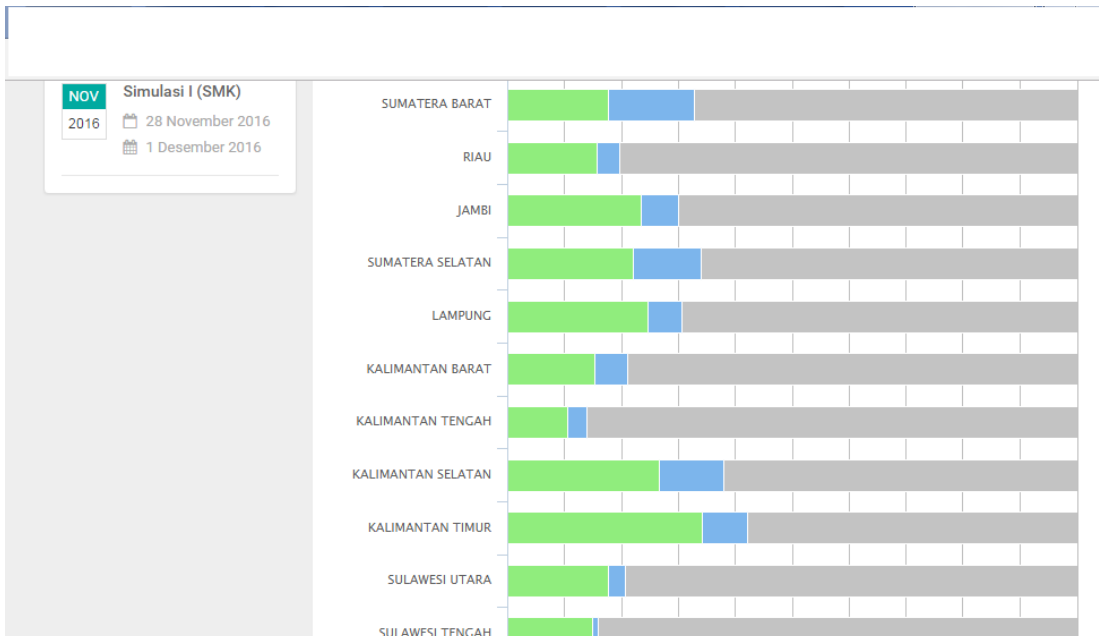
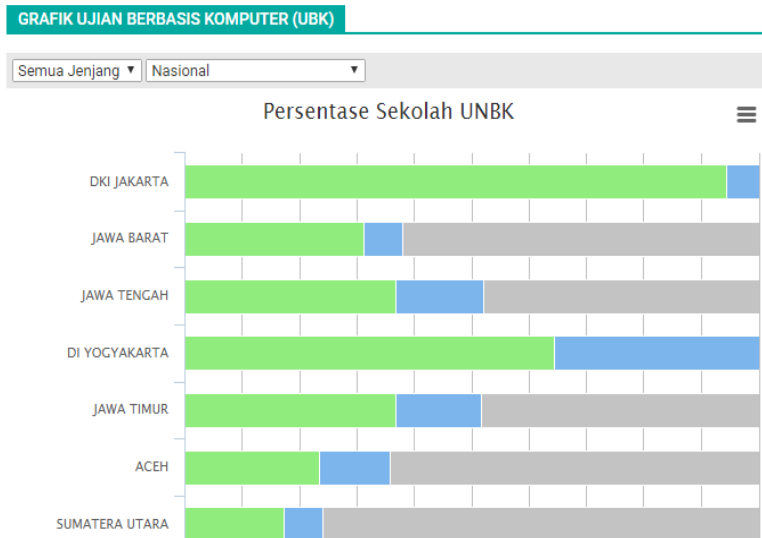
Berikut ini Statistik Ujian Nasional Berbasis Komputer/UNBK tahun ajaran
2016/2017



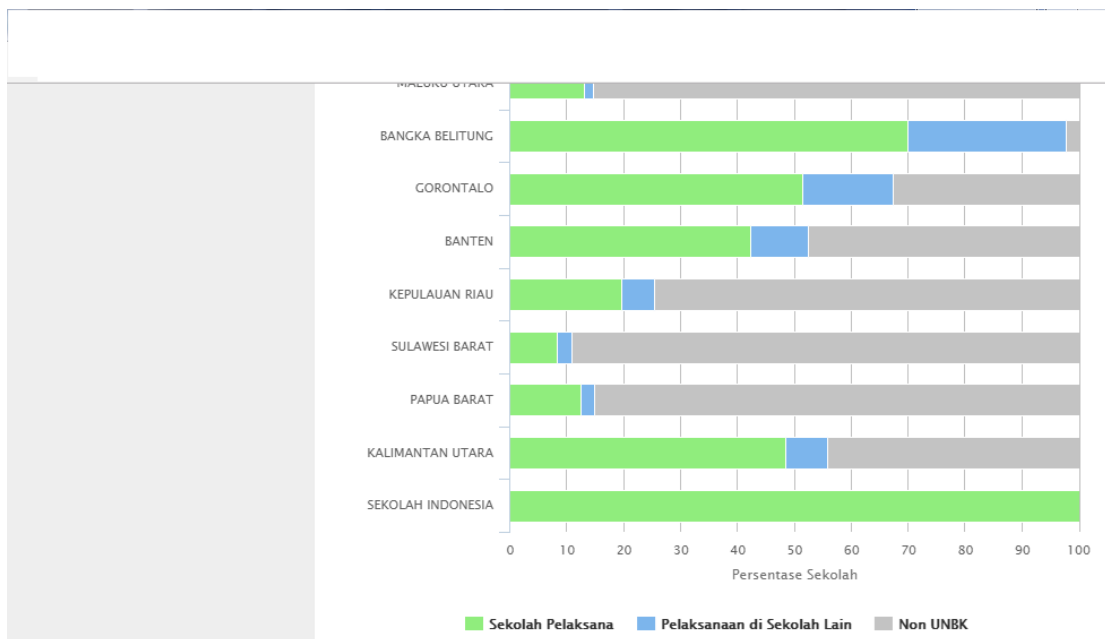
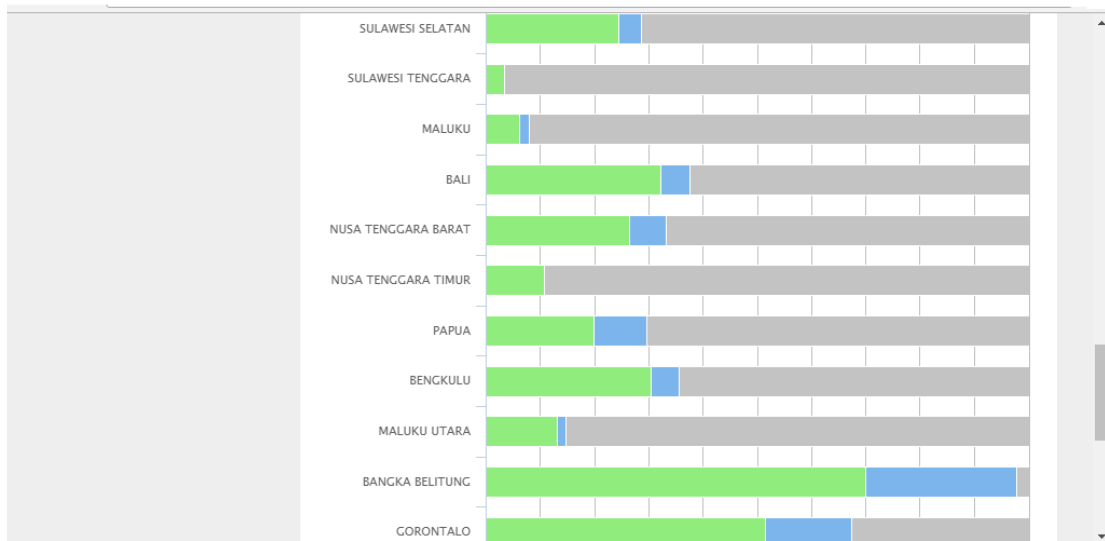
Gambar 1.3 Presentase Sekolah UNBK

JADWAL KEGIATAN

- OKT 2016**
 - Pendaftaran Sekolah**
 - 📅 1 Oktober 2016
 - 📅 31 Oktober 2016
- NOV 2016**
 - Penetapan Sekolah**
 - 📅 7 November 2016
 - 📅 -
- NOV 2016**
 - Verifikasi Data Siswa**
 - 📅 1 November 2016
 - 📅 10 November 2016
- NOV 2016**
 - Simulasi I (SMP/SMA)**
 - 📅 21 November 2016
 - 📅 25 November 2016



Sumber: <http://kemendikbud.ac.id>: 2017



Sumber: <http://kemendikbud.ac.id>: 2017

Berdasarkan dari data di atas kota DKI Jakarta memiliki presentase sekolah tertinggi yang mengikuti pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer secara nasional. Selain itu Ujian Nasional Berbasis Komputer dilaksanakan pertama kali di kota DKI Jakarta pada tahun 2014 silam, dan pada saat pelaksanaan tersebut ada 3 sekolah yang terpilih untuk dijadikan uji coba pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer yaitu, SMA Negeri 8, SMA Negeri 71 dan SMA Negeri 28 Jakarta.

SMA Negeri 8 merupakan salah satu SMA pertama yang dijadikan uji coba untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer untuk wilayah DKI Jakarta, bersamaan dengan SMA Negeri 71 dan SMA Negeri 28 Jakarta pada tahun ajaran 2014/2015. Alasan penulis memilih SMA Negeri 8 Jakarta berdasarkan dari hasil penilaian dari pemerintah yang diraih oleh SMA Negeri 8 Jakarta yaitu sebagai SMA Negeri yang memiliki hasil ujian nasional tertinggi di Jakarta sejak tahun 2007.

Data Statistik SMA Prov DKI Jakarta

Rank 2014	Rank 2013	Δ	School	Π 2014	Rank 2014	Rank 2013	Δ	School	Π 2014
1	1	↔	SMA 8	9.54	20	16	↓4	SMA 38	8.87
2	2	↔	SMA 28	9.42	21	27	↑6	SMA 2	8.87
3	3	↔	SMA 81	9.42	22	18	↓4	SMA 90	8.83
4	7	↑3	SMA 61	9.32	23	19	↓4	SMA 99	8.80
5	6	↑1	SMA 68	9.30	24	24	↔	SMA 6	8.80
6	4	↓2	SMA 39	9.23	25	25	↔	SMA 49	8.77
7	8	↑1	SMA 78	9.20	26	26	↔	SMA 91	8.76
8	5	↓3	SMA 34	9.20	27	31	↑4	SMA 103	8.72
9	14	↑5	SMA 21	9.11	28	40	↑12	SMA 1	8.70
10	11	↑1	SMA 26	9.09	29	33	↑4	SMA 54	8.69
11	9	↓2	SMA 48	9.08	30	30	↔	SMA 67	8.68
12	10	↓2	SMA 47	9.07	31	34	↑3	SMA 112	8.67
13	12	↓1	SMA 70	9.03	32	36	↑4	SMA 44	8.64
14	15	↑1	SMA 12	8.96	33	23	↓10	SMA 33	8.60
15	21	↑6	SMA 65	8.96	34	32	↓2	SMA 62	8.58
16	17	↑1	SMA 14	8.95	35	39	↑4	SMA 58	8.57
17	13	↓4	SMA 71	8.95	36	29	↓7	SMA 66	8.56
18	22	↑4	SMA 13	8.94	37	35	↓2	SMA 98	8.54
19	20	↑1	SMA 77	8.92	38	28	↓10	SMA 3	8.51

Sumber: Pusat Penilaian Pendidikan, 2017

SMA Negeri 8 Jakarta merupakan SMA unggulan di wilayah DKI Jakarta karena menempati peringkat Ujian Nasional Terbaik se-Jakarta sejak tahun ajaran 2005/2006 sampai tahun ajaran 2015/2016. SMA Negeri 8 Jakarta didirikan pada tanggal 1 Agustus 1958 di Taman Selamat Rijadi Jakarta dengan nama SMA Negeri VIII/ABC dengan Sp. Menteri P.D.K tanggal 21 Agustus 1958 No.26/SK/B.111. Pada bulan Januari 1959 dilakukan pemindahan tempat atau gedung sekolah di SMP Negeri III Jakarta, Jl. Manggarai Utara IV/6 Jatinegara. Dan pada tanggal 30 Maret 1971 SMA Negeri 8 Jakarta berdiri di Jalan Taman Bukitduri Tebet dan diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin.

Pada saat ini ada 1054 siswa/siswi aktif di SMA Negeri 8 Jakarta, dari total jumlah tersebut sebanyak 349 siswa/siswi berada di kelas 12 yang terdiri dari kelas IPA sebanyak 258, kelas IPS 34 dan kelas Internasional 57.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis melakukan penelitian tentang:

“Persepsi Pelajar Mengenai Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer / Ujian Nasional Computer Based Test (UNCBT) tahun ajaran 2016/2017. (Studi pada Pelajar kelas XII SMA Negeri 8 Jakarta).”

1.2 Identifikasi Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban melalui pengumpulan data. Bentuk rumusan masalah yang akan dikembangkan oleh peneliti adalah rumusan masalah Perspektif dimana rumusan masalah berisi pernyataan-pernyataan mengenai persepsi terhadap pelaksanaan Ujian Nasional berbasis komputer / online.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Persepsi Pelajar (siswa/siswi) SMA Negeri 8 Jakarta Mengenai Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Persepsi Pelajar (siswa/siswi) SMA Negeri 8 Jakarta mengenai Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yaitu:

1.4.1 Aspek Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu serta pengetahuan di bidang komunikasi mengenai Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer.
2. Sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan di masa yang akan datang.

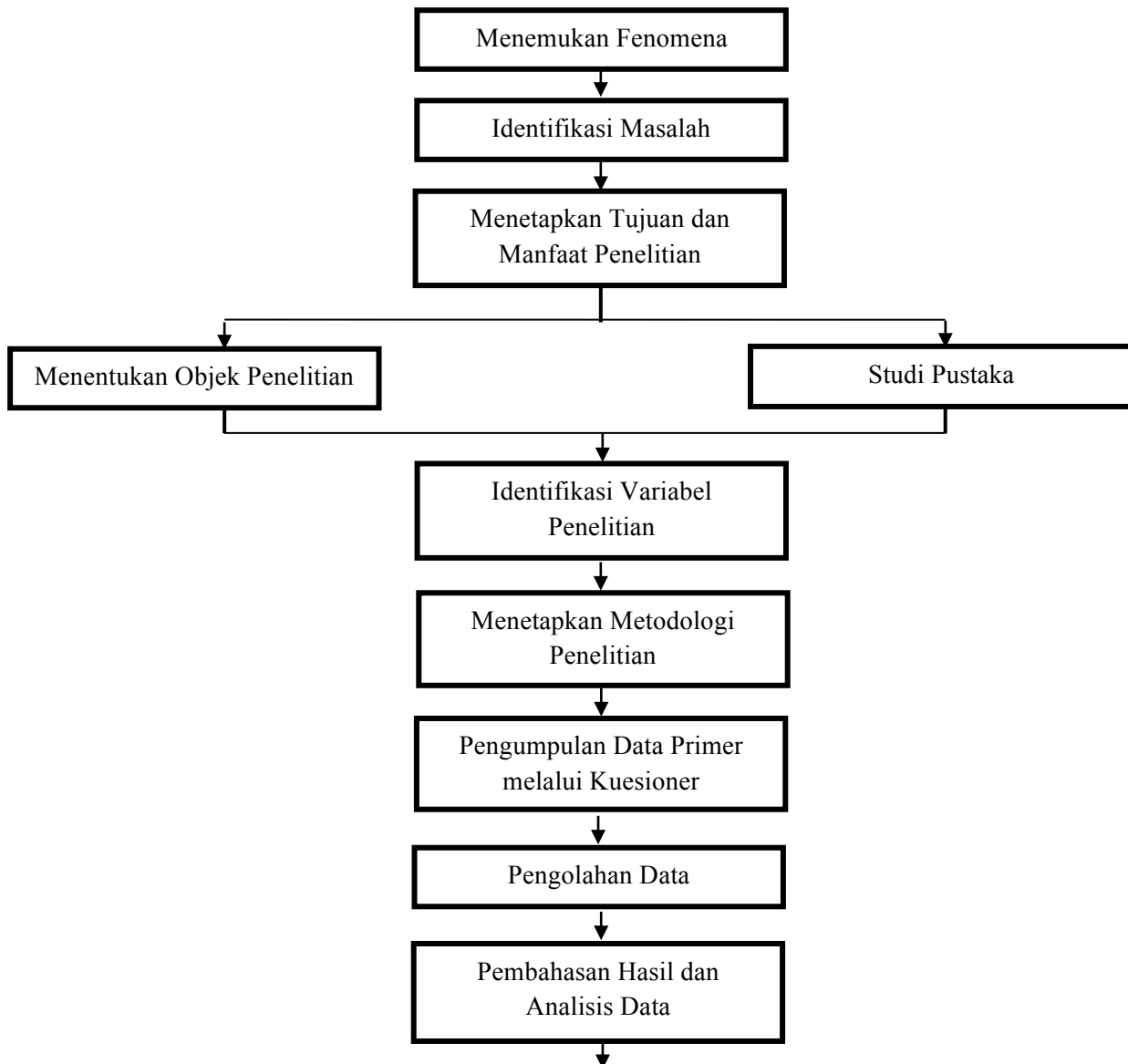
1.4.2 Aspek Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 57 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer / UNCBT terhadap Persepsi Pelajar di SMA Negeri 8 Jakarta.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 57 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer / UNCBT.

1.5 Tahapan Penelitian

Peneliti membagi penelitian ini menjadi beberapa tahapan penelitian yang bertujuan untuk mempermudah pengerjaan penelitian. Tahapan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Gambar 1.4
Tahapan Penelitian



Kesimpulan dan Saran

Sumber: Olahan Penulis, 2017

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota DKI Jakarta, SMA Negeri 8 Jakarta Selatan. Informan yang dipilih adalah para Pelajar (Siswa/siswi) kelas XII SMA Negeri 8 Jakarta yang telah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer tahun ajaran 2016/2017.

Periode pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

Tabel 1.1

Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
Persiapan penyusunan proposal bab 1-3										
Desk Evaluation										
Pengumpulan Data										
Penyelesaian data meliputi kesimpulan dan saran										

Sumber: Olahan Penulis, 2017